



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNUNG HUTAPEA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 236978

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 9.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/369 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/337 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HADIAH Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HADIAH Rp. 1.600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 550.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.428.895**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	10.059.428.895
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.949.428.895

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.